



Rekonstruksi Otoritas Keilmuan dalam Pendidikan Islam di Era Kecerdasan Buatan: Analisis Sosiologis atas Pergeseran Relasi Guru dan Pengetahuan

Sabariah*

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: sabariah@alhikmahmedan.ac.id

Indah Syahputri

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: indahputry518@gmail.com

Affryyana Febbryyana. L

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: afryyann@gmail.com

Sheilla Salsabilla

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: sheillasalsabilla001@gmail.com

Nurindah Hasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: nurindahhasanah583@gmail.com

Agi Ashari

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: agiashari157@gmail.com

Sultan Halipah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: sultanhalifah3@gmail.com

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	04 Mei 2026	05 Juni 2026	17 Juni 2026	29 Juni 2026

Abstract

The transformation of the use of artificial intelligence (AI) in education has changed patterns of access, production, and distribution of knowledge, including in Islamic education. The increasing dependence of students on AI systems as a source of religious information raises questions about epistemic legitimacy, shifts in scientific authority, and the relevance of knowledge transmission models that have traditionally relied on teacher-student relationships. Although studies on the digitalization of Islamic education continue to develop, analysis of the reconstruction of scientific authority in the context of the interaction between normative and algorithmic authority remains relatively limited. This study aims to analyze the shifting relationship between teachers and knowledge and to formulate a model for reconstructing scientific authority in Islamic education in the AI era. The study uses a qualitative approach, grounded in a literature review and employing

Corresponding author: sabariah@alhikmahmedan.ac.id*

Copyright (c) 2026 the author. Published by Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin. This is an open access article under a [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 

critical content analysis, to examine the sociology of education, scientific authority, Islamic epistemology, and the development of AI. The results show that AI encourages the deconstruction of scientific authority from a centralized model to a distributed epistemic network, enabling more open, cross-authority access to knowledge. In this context, teachers no longer function as the sole source of knowledge but have transformed into epistemic mediators, information curators, truth validators, and digital literacy facilitators. Research also finds that the legitimacy of knowledge has shifted from the dominance of *sanad* (traditional chain of transmission) and personal authority to a hybrid mechanism that combines scientific credibility, digital verification, information accuracy, and algorithmic transparency. These findings produce a hybrid-collaborative model of scientific authority that emphasizes that contemporary Islamic educational authority is constructed through negotiations between scientific competence, epistemic ethics, and digital curation capacity, thus enriching the study of the sociology of Islamic education in the face of technological disruption.

Keywords: Scientific Authority; Islamic Education; Artificial Intelligence; Teacher Relations; Epistemic Legitimacy

Abstrak

Transformasi penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam pendidikan telah mengubah pola akses, produksi, dan distribusi pengetahuan, termasuk dalam pendidikan Islam. Meningkatnya ketergantungan peserta didik terhadap sistem AI sebagai sumber informasi keagamaan memunculkan persoalan mengenai legitimasi epistemik, pergeseran otoritas keilmuan, dan relevansi model transmisi pengetahuan yang selama ini bertumpu pada relasi guru-murid. Meskipun kajian tentang digitalisasi pendidikan Islam terus berkembang, analisis mengenai rekonstruksi otoritas keilmuan dalam konteks interaksi antara otoritas normatif dan otoritas algoritmik masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran relasi antara guru dan pengetahuan serta merumuskan model rekonstruksi otoritas keilmuan dalam pendidikan Islam di era AI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan teknik analisis isi kritis terhadap literatur mengenai sosiologi pendidikan, otoritas keilmuan, epistemologi Islam, dan perkembangan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mendorong dekonstruksi otoritas keilmuan dari model sentralistik menuju jaringan epistemik terdistribusi yang memungkinkan akses pengetahuan berlangsung secara lebih terbuka dan lintas otoritas. Dalam konteks ini, guru tidak lagi berfungsi sebagai sumber tunggal pengetahuan, tetapi bertransformasi menjadi mediator epistemik, kurator informasi, validator kebenaran, dan fasilitator literasi digital. Penelitian juga menemukan bahwa legitimasi pengetahuan mengalami pergeseran dari dominasi sanad dan otoritas personal menuju mekanisme hibrid yang menggabungkan kredibilitas keilmuan, verifikasi digital, akurasi informasi, dan transparansi algoritmik. Temuan tersebut menghasilkan model otoritas keilmuan hibrid-kolaboratif yang menegaskan bahwa otoritas pendidikan Islam kontemporer dibangun melalui negosiasi antara kompetensi keilmuan, etika epistemik, dan kapasitas kurasi digital, sehingga memperkaya kajian sosiologi pendidikan Islam dalam menghadapi disrupsi teknologi.

Kata Kunci: Otoritas Keilmuan; Pendidikan Islam; Kecerdasan Buatan; Relasi Guru; Legitimasi Epistemik

Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah mengubah mekanisme produksi, distribusi, dan legitimasi pengetahuan secara fundamental,

termasuk dalam pendidikan Islam yang secara historis bertumpu pada otoritas keilmuan guru (Siregar, 2025). Otoritas keilmuan dalam konteks ini merujuk pada legitimasi sosial, intelektual, dan moral yang dimiliki guru untuk mentransmisikan, menafsirkan, serta memverifikasi pengetahuan keislaman melalui penguasaan ilmu, sanad keilmuan, dan pengakuan institusional. Kehadiran AI menggeser pola akses pengetahuan dari model yang berpusat pada guru menuju model yang berpusat pada jaringan informasi digital yang bersifat terbuka, cepat, dan terdesentralisasi (Bagasharov et al., 2026).

Pergeseran tersebut memengaruhi struktur relasi antara otoritas, pengetahuan, dan proses pembelajaran. Perspektif sosiologi pengetahuan menunjukkan bahwa otoritas keilmuan terbentuk melalui relasi sosial yang terus berubah mengikuti transformasi teknologi dan struktur kekuasaan (Parada-Ulloa et al., 2026). Konsep otoritas tradisional dan legal-rasional Weber, relasi kuasa-pengetahuan Foucault, serta modal simbolik Bourdieu menjelaskan bahwa legitimasi pengetahuan tidak bersifat tetap, melainkan selalu dinegosiasikan melalui konteks sosial tertentu (Haugaard, 2022). Situasi tersebut menempatkan pendidikan Islam pada tantangan khusus karena transmisi ilmu tidak hanya berorientasi pada akurasi informasi, tetapi juga pada pembentukan adab, integritas moral, dan kesinambungan sanad keilmuan. Akibatnya, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi konsep otoritas keilmuan agar tetap relevan terhadap perkembangan AI tanpa kehilangan fondasi epistemologis, normatif, dan spiritual yang menjadi karakter utama pendidikan Islam.

Fenomena tersebut memperoleh legitimasi empiris melalui percepatan adopsi AI dalam sektor pendidikan global. Laporan UNESCO (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 60% institusi pendidikan tinggi di berbagai negara telah mulai mengintegrasikan sistem AI ke dalam aktivitas pembelajaran, asesmen, dan pengelolaan akademik. Survei World Economic Forum (2024) memperlihatkan bahwa penggunaan AI generatif oleh peserta didik meningkat secara signifikan sebagai sumber utama pencarian informasi dan penyelesaian tugas akademik. OECD (2021) menegaskan bahwa fungsi guru mengalami transformasi dari penyedia utama pengetahuan menjadi fasilitator yang berinteraksi dengan sistem cerdas yang mampu menghasilkan rekomendasi, analisis, dan evaluasi secara otomatis. Fenomena serupa mulai terlihat pada berbagai lembaga pendidikan Islam yang memanfaatkan chatbot AI, mesin pencarian literatur keislaman, sistem pembelajaran adaptif, serta aplikasi analisis teks keagamaan untuk mendukung proses belajar (Syukur et al., 2024). Kemudahan akses tersebut meningkatkan efisiensi pembelajaran, tetapi sekaligus memunculkan persoalan baru berupa melemahnya ketergantungan peserta didik terhadap guru sebagai sumber otoritatif, meningkatnya konsumsi pengetahuan instan yang tidak selalu terverifikasi secara epistemologis, dan munculnya aktor nonmanusia yang turut memengaruhi proses legitimasi pengetahuan. Konsekuensi tersebut berpotensi mengubah pola transmisi

ilmu, mekanisme pembentukan otoritas, serta kualitas pemahaman keagamaan apabila tidak direspons melalui kerangka konseptual yang memadai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara teknologi digital, AI, dan pendidikan Islam, meskipun masih menyisakan ruang pengembangan konseptual yang signifikan. Ardani dan Mwila (2025) menemukan bahwa digitalisasi pembelajaran memperluas akses terhadap literatur klasik Islam, tetapi studi tersebut terbatas pada aspek aksesibilitas dan belum menjelaskan perubahan mekanisme legitimasi keilmuan. Rahmani (2025) menunjukkan bahwa penggunaan platform berbasis AI cenderung mendorong pola pembelajaran instan yang berpotensi mengurangi kedalaman pemahaman konseptual, namun belum menganalisis implikasinya terhadap otoritas guru. Umar dan Yunus (2025) mengungkap bahwa transformasi digital menggeser struktur otoritas dari pola hierarkis menuju pola yang lebih horizontal, tetapi pembahasannya belum menjangkau dimensi epistemologis pendidikan Islam.

Sulhayani (2025) menjelaskan kemunculan bentuk otoritas baru berbasis data dan algoritma, namun tidak mengaitkannya dengan konsep sanad, adab, dan validitas pengetahuan keislaman. Saepurohman et al. (2025) menekankan pentingnya literasi digital dalam pendidikan Islam, tetapi belum membahas perubahan relasi antara guru, peserta didik, dan sumber pengetahuan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terfragmentasi antara kajian teknologi pendidikan, literasi digital, dan teori otoritas, sehingga belum menghasilkan model konseptual yang secara khusus menjelaskan bagaimana AI mentransformasi mekanisme pembentukan otoritas keilmuan dalam pendidikan Islam. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* berupa belum terintegrasinya perspektif sosiologi otoritas, sosiologi pengetahuan, dan epistemologi pendidikan Islam untuk menjelaskan pergeseran relasi guru dan pengetahuan sekaligus merumuskan bentuk otoritas keilmuan yang relevan bagi era AI.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga pertanyaan utama: bagaimana pergeseran relasi guru dan pengetahuan terjadi, bagaimana otoritas keilmuan direkonstruksi, serta bagaimana dinamika tersebut dianalisis dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam? Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi otoritas keilmuan secara sosiologis, mengidentifikasi bentuk-bentuk otoritas baru yang muncul akibat interaksi antara teknologi dan pendidikan Islam, serta mengembangkan model konseptual rekonstruksi otoritas keilmuan yang adaptif terhadap perkembangan digital. Argumen dasar penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa otoritas keilmuan merupakan konstruksi sosial yang terus berubah mengikuti dinamika teknologi, distribusi pengetahuan, dan konfigurasi kekuasaan, sehingga keberadaan AI tidak menghapus peran guru, melainkan mengubah basis legitimasi otoritas dari dominasi akses informasi menuju kapasitas verifikasi, interpretasi, pembimbingan etis, dan pembentukan

karakter. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang menghubungkan teori otoritas, sosiologi pengetahuan, dan epistemologi pendidikan Islam dalam menjelaskan transformasi otoritas keilmuan era AI. Kontribusi praktisnya berupa penyediaan landasan konseptual bagi lembaga pendidikan Islam, pengambil kebijakan, dan pendidik untuk merancang strategi pemanfaatan AI yang inovatif tanpa menghilangkan fungsi guru sebagai penjaga validitas, etika, dan orientasi nilai dalam proses pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *integrative literature review* yang dipadukan dengan analisis sosiologi digital dan kerangka sosiologi pengetahuan untuk mengkaji rekonstruksi otoritas keilmuan dalam pendidikan Islam pada era kecerdasan buatan. Paradigma konstruktivis-kritis digunakan untuk menjelaskan perubahan relasi antara guru, pengetahuan, dan teknologi dalam ekosistem pembelajaran digital. Data penelitian terdiri atas artikel jurnal bereputasi yang terindeks Scopus dan Web of Science, buku akademik otoritatif, dokumen kebijakan pendidikan dan kecerdasan buatan, pedoman etika AI, serta literatur klasik dan kontemporer dalam epistemologi Islam yang diterbitkan pada rentang 2016–2026. Data pendukung diperoleh dari laporan lembaga internasional, repositori akademik terbuka, dan diskursus digital yang relevan dengan transformasi otoritas pengetahuan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data ilmiah menggunakan kata kunci terstruktur, seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, pemetaan bibliometrik dan tematik menggunakan perangkat analisis literatur, serta pengodean konseptual terhadap narasi mengenai otoritas epistemik, kecerdasan buatan, dan pendidikan Islam. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi dan klasifikasi tematik, analisis wacana kritis terhadap struktur pengetahuan digital, interpretasi hermeneutik-kritis atas hubungan antara otoritas guru dan sistem AI, serta sintesis konseptual berlapis untuk merumuskan model rekonstruksi otoritas keilmuan yang menempatkan kolaborasi manusia-AI dalam kerangka epistemologi pendidikan Islam yang kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Otoritas Keilmuan dalam Pendidikan Islam di Era Kecerdasan Buatan

Otoritas keilmuan dalam pendidikan Islam secara historis dibangun melalui relasi epistemik yang menghubungkan pengetahuan, otoritas moral, dan pengakuan sosial. Keabsahan pengetahuan ditentukan oleh kredibilitas subjek yang mentransmisikannya melalui sanad intelektual, penguasaan metodologi, serta integritas etis yang memperoleh legitimasi kolektif (Umar et al., 2025). Struktur tersebut mengalami transformasi ketika kecerdasan buatan menghadirkan mekanisme produksi pengetahuan berbasis algoritma yang mampu menyediakan

jawaban instan tanpa keterikatan terhadap pengalaman intelektual maupun proses transmisi tradisional (Alavi, Leidner, & Mousavi, 2024). Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran otoritas epistemik, yaitu perpindahan dasar kepercayaan terhadap pengetahuan dari figur berotoritas menuju sistem komputasional yang memperoleh legitimasi melalui performa teknologis. Pergeseran tersebut menandai perubahan mendasar basis epistemologis pendidikan Islam kontemporer.

Transformasi tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknologi, melainkan sebagai rekonfigurasi medan sosial pengetahuan yang mengubah distribusi kapital epistemik dan kapital simbolik. Struktur pendidikan Islam sebelumnya menempatkan ulama, guru, dan institusi pendidikan sebagai pemegang otoritas yang memperoleh pengakuan melalui kompetensi keilmuan, pengabdian intelektual, serta legitimasi komunitas (Kusuma et al., 2025). Kemunculan kecerdasan buatan memperluas akses terhadap sumber pengetahuan sehingga otoritas tidak lagi terkonsentrasi pada aktor tertentu. Jaringan digital memungkinkan pengetahuan beredar melampaui batas institusional yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan kualitas (Tang, Du, Wang, & Wu, 2024). Pergeseran tersebut menghasilkan redistribusi kapital pengetahuan menuju aktor dan platform yang memiliki visibilitas tinggi dalam ruang digital. Legitimasi sosial kemudian semakin dipengaruhi oleh keterjangkauan informasi, intensitas interaksi, dan kemampuan teknologi memenuhi kebutuhan pengguna. Situasi ini menciptakan bentuk kekuasaan pengetahuan baru yang tidak sepenuhnya menggantikan struktur lama, tetapi mengubah prinsip-prinsip yang menentukan siapa yang dianggap layak menjadi rujukan otoritatif.

Perubahan distribusi otoritas tersebut berlangsung melalui mekanisme sosial yang lebih kompleks dibanding sekadar demokratisasi akses pengetahuan. Keterbukaan informasi memang memperluas kesempatan memperoleh sumber belajar, tetapi sekaligus menggeser fungsi mediasi yang sebelumnya dijalankan guru dan institusi pendidikan. Kecerdasan buatan memungkinkan peserta didik memperoleh jawaban tanpa melewati proses verifikasi sosial yang lazim berlangsung dalam tradisi pembelajaran. Akibatnya, relasi antara pengetahuan dan otoritas mengalami dekoupling parsial karena akses terhadap informasi tidak selalu diikuti kemampuan mengevaluasi validitas epistemiknya (Shahzad, Xu, & Zahid, 2025). Kondisi ini memperkuat ketergantungan epistemik terhadap sistem algoritmik yang bekerja melalui seleksi, pengelompokan, dan reproduksi data. Klaim objektivitas yang melekat pada keluaran sistem sesungguhnya bersifat konstruktif karena terbentuk melalui keputusan desain, pilihan data, serta parameter teknis yang merefleksikan kepentingan tertentu (Huan, Jagalur, & Marzouk, 2024). Perspektif ini menunjukkan bahwa otoritas algoritmik bukan hasil netralitas teknologi, melainkan produk relasi sosial yang tersembunyi dalam infrastruktur digital.

Konsekuensi berikutnya tampak pada perubahan habitus intelektual yang membentuk cara individu berinteraksi dengan pengetahuan. Tradisi pendidikan Islam menempatkan proses belajar sebagai aktivitas yang menuntut kedalaman refleksi, ketekunan metodologis, penguasaan konteks, dan pembentukan karakter intelektual (Amir et al., 2024). Logika kecerdasan buatan menghadirkan pola interaksi berbeda melalui penyediaan informasi yang cepat, responsif, dan berorientasi pemecahan masalah praktis. Paparan berulang terhadap mekanisme tersebut membentuk preferensi kognitif yang semakin menghargai efisiensi akses dibanding proses eksplorasi yang panjang (Seo, Tang, Roll, Fels, & Yoon, 2021). Perubahan habitus berlangsung melalui internalisasi praktik digital yang secara perlahan membentuk persepsi mengenai cara belajar yang dianggap efektif. Pengetahuan kemudian berpotensi dipahami sebagai komoditas informasi yang siap digunakan, bukan sebagai hasil proses intelektual yang memerlukan interpretasi kritis.

Ketegangan semakin terlihat ketika kecerdasan buatan memperoleh pengakuan sebagai sumber rujukan yang dianggap memiliki kepakaran. Kemampuan menghasilkan jawaban yang sistematis dan meyakinkan menciptakan persepsi bahwa sistem memiliki otoritas intrinsik layaknya ahli manusia. Padahal, otoritas tersebut bersifat derivatif karena bergantung pada data, model, dan keputusan manusia yang menjadi fondasi pengembangannya. Legitimasi kecerdasan buatan terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang menghubungkan kepercayaan publik, reputasi teknologi, dan pengalaman pengguna (Korneeva et al., 2023). Fenomena ini melahirkan bentuk otoritas simulatif yang menampilkan karakteristik kepakaran tanpa memiliki kesadaran, tanggung jawab moral, maupun pengalaman eksistensial yang menjadi fondasi otoritas keilmuan klasik. Perbedaan ini penting karena kemampuan menghasilkan informasi tidak identik dengan kemampuan memahami makna, mempertimbangkan konsekuensi etis, atau melakukan penalaran normatif yang kontekstual. Pengaburan batas antara informasi dan pemahaman berpotensi menghasilkan kesalahan penilaian terhadap kualitas otoritas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan.

Konteks pendidikan Islam memperlihatkan bahwa transformasi tersebut memiliki implikasi yang lebih mendalam dibanding lingkungan pendidikan umum. Otoritas keilmuan Islam bertumpu pada kesinambungan transmisi ilmu, validitas sanad, kompetensi interpretatif, serta tanggung jawab moral yang menyertai proses pengajaran (Umar et al., 2025). Kecerdasan buatan mampu mempercepat akses terhadap khazanah keilmuan, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi pembimbingan yang menghubungkan teks, konteks, dan tujuan etis pembelajaran. Posisi guru tidak semata-mata sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai aktor yang memediasi pembentukan nalar, karakter, dan orientasi nilai. Pergeseran menuju sumber pengetahuan berbasis algoritma menimbulkan tantangan ketika legitimasi keilmuan mulai diukur berdasarkan kecepatan dan kemudahan akses,

bukan kualitas proses interpretasi. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan otoritas menyentuh fondasi epistemologis yang menentukan hubungan antara ilmu, otoritas, dan pembentukan manusia dalam tradisi pendidikan Islam.

Hubungan antara algoritmisasi pengetahuan, redistribusi kapital epistemik, dan perubahan legitimasi sosial menunjukkan bahwa transformasi otoritas keilmuan berlangsung melalui mekanisme yang saling berkaitan. Algoritmisasi pengetahuan mengubah cara informasi diproduksi dan diedarkan. Perubahan tersebut mendorong redistribusi kapital epistemik karena akses terhadap pengetahuan tidak lagi dimonopoli institusi tradisional. Redistribusi kapital kemudian memengaruhi pola legitimasi sosial yang semakin menghargai visibilitas digital, efektivitas teknologi, dan kemudahan akses. Interaksi ketiga proses tersebut menghasilkan konfigurasi baru kekuasaan pengetahuan yang berbeda dari struktur sebelumnya. Guru, ulama, institusi pendidikan, platform digital, dan sistem kecerdasan buatan terlibat dalam medan sosial yang sama untuk memperoleh pengakuan sebagai sumber otoritatif. Otoritas tidak lagi dipahami sebagai atribut tetap yang melekat pada individu tertentu, melainkan sebagai hasil negosiasi berkelanjutan antara sumber daya intelektual, teknologi, dan pengakuan sosial yang terus berubah.

Pergeseran Relasi Guru dan Pengetahuan: Dari Mediator Ilmu ke Kompetitor Epistemik

Transformasi teknologi kecerdasan buatan mengubah struktur distribusi pengetahuan melalui pergeseran mekanisme mediasi yang selama ini menempatkan guru sebagai pusat otoritas epistemik. Akses terhadap informasi tidak lagi bergantung pada hubungan langsung antara peserta didik dan guru, tetapi berlangsung melalui ekosistem pembelajaran digital yang mempertemukan berbagai sumber pengetahuan dalam satu ruang interaksi (Berg et al., 2026). Situasi ini mencerminkan proses disintermediasi pendidikan, yaitu berkurangnya ketergantungan terhadap perantara tradisional akibat hadirnya teknologi yang memungkinkan akses pengetahuan secara mandiri. Perubahan tersebut menyentuh aspek legitimasi pengetahuan yang sebelumnya dilekatkan pada posisi institusional guru. Perspektif sosiologi pengetahuan menunjukkan bahwa otoritas epistemik merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui pengakuan kolektif terhadap sumber pengetahuan yang dianggap sah (Barzen, 2025). Kehadiran kecerdasan buatan menggeser dasar pengakuan tersebut dari status formal menuju kemampuan menyediakan informasi yang cepat, mudah diakses, responsif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Pergeseran ini mengubah medan produksi serta distribusi modal epistemik dalam pendidikan Islam.

Ekologi pembelajaran digital menghadirkan konfigurasi baru hubungan antara peserta didik dan pengetahuan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya pintu masuk menuju informasi akademik karena peserta didik dapat memperoleh penjelasan, ringkasan, interpretasi, bahkan rekomendasi pembelajaran melalui sistem

kecerdasan buatan (Akiba & Fraboni, 2023). Kondisi ini memperluas ruang *learner autonomy* karena proses pencarian dan pengelolaan pengetahuan semakin banyak dikendalikan oleh individu. Kemandirian tersebut menghasilkan konsekuensi ambivalen. Satu sisi memperkuat kapasitas eksplorasi pengetahuan melalui akses yang lebih luas, sisi lain mengurangi intensitas interaksi pedagogis yang selama ini berfungsi membangun pemahaman konseptual secara bertahap. Relasi pembelajaran bergerak dari pola yang berpusat pada transmisi pengetahuan menuju pola jaringan yang menghubungkan peserta didik dengan beragam sumber informasi.

Percepatan teknologi turut membentuk standar baru dalam konsumsi pengetahuan. Kecerdasan buatan bekerja melalui logika respons instan yang menghasilkan ekspektasi terhadap kecepatan akses informasi (Safrizal et al., 2026). Fenomena ini sejalan dengan teori percepatan sosial yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi membentuk orientasi baru terhadap waktu, efisiensi, dan produktivitas (Schot & Kanger, 2018). Guru menghadapi tantangan ketika ritme pedagogis yang menekankan proses reflektif berhadapan dengan budaya belajar yang mengutamakan respons cepat. Ketegangan tersebut bukan sekadar persoalan teknis pembelajaran, tetapi menyangkut perubahan kriteria legitimasi pengetahuan. Pengetahuan mulai dinilai melalui parameter kemudahan akses, relevansi kontekstual, dan kecepatan respons. Meskipun demikian, kecepatan tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi epistemik. Kredibilitas pengetahuan tetap bergantung pada kemampuan melakukan verifikasi, interpretasi, dan penilaian kritis.

Mekanisme verifikasi pengetahuan mengalami perubahan signifikan ketika peserta didik memperoleh kesempatan membandingkan penjelasan guru dengan keluaran sistem kecerdasan buatan. Praktik tersebut menciptakan ruang negosiasi epistemik yang lebih terbuka dibandingkan model pendidikan konvensional. Kebenaran tidak lagi diterima berdasarkan posisi sosial penyampai informasi, tetapi melalui proses evaluasi terhadap berbagai sumber yang tersedia. Pola semacam ini menunjukkan munculnya otoritas jaringan, yaitu bentuk legitimasi yang lahir melalui interaksi antaraktor, perangkat teknologi, dan komunitas pengguna. Struktur relasi guru-peserta didik bergerak menuju bentuk yang lebih dialogis karena klaim pengetahuan dapat dipertanyakan, diuji, serta dibandingkan secara langsung. Namun hubungan yang lebih terbuka tidak selalu menghasilkan distribusi kekuasaan yang setara. Sistem algoritmik memiliki kemampuan memengaruhi pilihan informasi pengguna melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya transparan (Dogruel, Facciorusso, & Stark, 2022). Realitas ini memperlihatkan bahwa pengurangan dominasi otoritas tradisional sering kali diikuti oleh kemunculan bentuk otoritas baru yang beroperasi melalui logika teknologi.

Perubahan posisi guru perlu dipahami melalui perspektif modal simbolik dan medan sosial pendidikan. Otoritas guru tidak semata-mata berasal dari penguasaan

informasi, tetapi dibangun melalui pengakuan terhadap kompetensi intelektual, integritas moral, pengalaman pedagogis, dan kapasitas interpretatif (Harris & Jones, 2019). Kecerdasan buatan mampu menyediakan informasi dalam jumlah besar, namun belum memiliki kemampuan sosial yang memungkinkan pembentukan hubungan edukatif secara utuh. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa kompetisi epistemik antara guru dan teknologi tidak berlangsung pada seluruh dimensi pengetahuan. Kompetisi terutama terjadi pada aspek distribusi informasi, sedangkan fungsi interpretasi, pembentukan makna, pembinaan karakter, serta pengembangan kesadaran reflektif tetap membutuhkan keterlibatan manusia. Perspektif ini menghindarkan analisis dari determinisme teknologi yang menganggap kecerdasan buatan sebagai pengganti penuh guru. Fokus utama perubahan terletak pada redistribusi fungsi epistemik yang mendorong guru memperkuat peran sebagai penafsir, kurator, dan pengarah proses pembelajaran.

Kontestasi otoritas pengetahuan semakin kompleks ketika algoritma memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dalam aktivitas belajar. Fenomena *algorithmic authority* menunjukkan bahwa legitimasi pengetahuan dapat terbentuk melalui keyakinan pengguna terhadap kemampuan sistem digital menghasilkan jawaban yang akurat (Hastuti et al., 2025). Kepercayaan semacam itu dipengaruhi persepsi objektivitas teknologi, kemudahan penggunaan, dan konsistensi respons yang diberikan. Situasi ini memunculkan bentuk baru hubungan kekuasaan epistemik yang tidak selalu terlihat secara langsung. Peserta didik berpotensi menerima rekomendasi algoritmik tanpa memahami mekanisme produksi informasi yang melatarinya. Risiko tersebut menimbulkan tantangan serius bagi pendidikan Islam karena proses pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan akuisisi pengetahuan, tetapi juga pembentukan kemampuan menilai validitas, konteks, dan implikasi etis suatu informasi. Kapasitas kritis menjadi semakin penting untuk mencegah dominasi otoritas algoritmik yang tidak disertai kesadaran reflektif terhadap sumber dan konstruksi pengetahuan.

Karakter jaringan pengetahuan digital mengubah cara legitimasi ilmiah diproduksi dan direproduksi dalam lingkungan pendidikan. Pengetahuan tidak lagi bergerak melalui jalur linier antara guru dan peserta didik, tetapi berkembang melalui hubungan multidirectional yang melibatkan platform digital, komunitas virtual, basis data daring, dan sistem kecerdasan buatan (Höttecke & Allchin, 2020). Struktur semacam ini memperlihatkan pergeseran dari model sentralistik menuju model distribusi pengetahuan yang tersebar. Konsekuensi sosiologisnya terlihat pada perubahan mekanisme pembentukan otoritas karena pengakuan terhadap sumber pengetahuan semakin bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan ekologi digital. Guru yang mampu mengintegrasikan teknologi secara kritis memiliki peluang mempertahankan legitimasi profesional yang lebih kuat dibandingkan dengan guru yang bertahan pada pola transmisi konvensional (Handini, 2025). Adaptasi tersebut bukan sekadar penguasaan perangkat digital, melainkan

kemampuan menghubungkan pengetahuan, konteks sosial, kebutuhan peserta didik, serta prinsip-prinsip akademik yang menjamin kualitas dan integritas proses pembelajaran.

Pergeseran relasi antara guru, peserta didik, dan sumber pengetahuan menunjukkan bahwa otoritas epistemik tidak mengalami penghapusan, tetapi rekonstruksi. Transformasi yang terjadi bergerak dari model berbasis monopoli pengetahuan menuju model yang bertumpu pada negosiasi legitimasi dalam lingkungan belajar yang semakin terbuka. Posisi guru tetap memiliki relevansi strategis karena kemampuan menyediakan kerangka interpretatif, melakukan validasi pengetahuan, membangun orientasi etis, dan menghubungkan informasi dengan konteks kehidupan sosial. Pendidikan Islam memperoleh tantangan sekaligus peluang melalui perubahan ini. Tantangan muncul ketika otoritas tradisional tidak lagi cukup untuk mempertahankan legitimasi keilmuan. Peluang muncul ketika guru mampu mereposisi diri sebagai aktor yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan pembentukan nalar kritis, kedewasaan moral, dan tradisi keilmuan yang berakar pada proses transmisi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rekonstruksi Sosial Otoritas Keilmuan: Negosiasi antara Tradisi dan Teknologi

Institusi pendidikan Islam menjadi arena utama pertarungan kepentingan yang muncul akibat pertemuan antara tradisi keilmuan berbasis sanad dan logika teknologi kecerdasan buatan yang menawarkan akses pengetahuan tanpa batas. Kontestasi tidak berlangsung antara tradisi dan teknologi sebagai entitas abstrak, tetapi melibatkan aktor dengan posisi dan kepentingan berbeda, seperti pimpinan lembaga, guru senior, pengelola kurikulum, mahasiswa, pengembang teknologi pendidikan, serta regulator pendidikan. Tekanan institusional muncul melalui tuntutan akreditasi, kompetisi antarlembaga, kebutuhan peningkatan literasi digital, dan ekspektasi masyarakat terhadap relevansi pendidikan Islam. Kondisi ini mendorong institusi melakukan penyesuaian strategis tanpa melepaskan sumber legitimasi tradisional yang selama ini menopang otoritas keilmuan. Perspektif institusionalisme menjelaskan bahwa adopsi teknologi tidak semata didorong pertimbangan efisiensi, tetapi juga kebutuhan mempertahankan legitimasi sosial. Kurikulum, regulasi akademik, dan kebijakan penggunaan AI menjadi instrumen yang digunakan untuk menegosiasikan batas penerimaan teknologi sekaligus menjaga keberlanjutan otoritas keilmuan yang telah lama mapan (Fogaça, Grijalvo, & Neto, 2022).

Kontestasi makna kecerdasan buatan berkembang melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung pada ruang akademik, forum keagamaan, komunitas pendidikan, serta platform digital. Perdebatan tidak hanya berpusat pada aspek teknis penggunaan AI, tetapi menyentuh definisi mengenai sumber pengetahuan yang sah, mekanisme transmisi ilmu, dan kriteria otoritas yang dapat dipercaya.

Kelompok konservatif memandang hubungan personal guru dan murid sebagai fondasi pembentukan karakter intelektual serta integritas moral yang tidak dapat digantikan sistem algoritmik (Safrizal et al., 2026). Kelompok adaptif menafsirkan AI sebagai instrumen perluasan akses ilmu yang mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperluas jangkauan dakwah (Papakostas, 2025). Perspektif konstruksi sosial menunjukkan bahwa makna teknologi tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk melalui interaksi, negosiasi, dan pertarungan definisi antaraktor (Hall, 2020). Proses eksternalisasi berlangsung ketika berbagai kelompok mengemukakan interpretasi masing-masing, objektivasi muncul melalui pembentukan norma penggunaan AI, sedangkan internalisasi terjadi ketika norma baru diterima sebagai bagian praktik pendidikan yang dianggap wajar dan legitim.

Proses negosiasi tidak menghasilkan konsensus yang terbentuk secara otomatis, tetapi berkembang melalui serangkaian interaksi yang mempertemukan kepentingan berbeda. Forum akademik, rapat kelembagaan, diskusi keagamaan, dan ruang digital berfungsi sebagai arena *negotiated order* tempat aktor pendidikan merumuskan batas penggunaan teknologi yang dapat diterima bersama (Samuelsson, 2025). Guru, mahasiswa, pengelola institusi, dan komunitas keagamaan berpartisipasi dalam pembentukan kesepakatan mengenai fungsi AI sebagai alat bantu, bukan pengganti otoritas ilmiah manusia. Hasil negosiasi dipengaruhi tingkat kepercayaan terhadap institusi, kapasitas literasi digital, posisi sosial aktor, serta persepsi terhadap risiko teknologi. Kesepakatan yang terbentuk bersifat kontingen karena selalu terbuka terhadap perubahan seiring perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pendidikan. Situasi ini menunjukkan bahwa rekonstruksi otoritas keilmuan merupakan proses sosial yang terus bergerak, bukan tahapan linear yang berakhir pada bentuk stabil dan final.

Perubahan struktur otoritas juga berkaitan erat dengan redistribusi modal budaya dan modal simbolik yang sebelumnya terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu. Tradisi pendidikan Islam menempatkan penguasaan ilmu, pengakuan sanad, dan pengalaman akademik sebagai sumber utama legitimasi (Berg et al., 2026). Kehadiran AI mengurangi eksklusivitas akses terhadap pengetahuan sehingga sebagian modal budaya kehilangan fungsi diferensiasinya. Kondisi ini tidak menghilangkan otoritas guru, tetapi mengubah sumber kekuatan yang menopangnya. Kemampuan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi validitas sumber, membangun kerangka berpikir kritis, dan menghubungkan pengetahuan dengan nilai etika menjadi modal simbolik baru yang semakin menentukan legitimasi. Perspektif reproduksi budaya menunjukkan bahwa guru melakukan penyesuaian strategi untuk mempertahankan posisi sosialnya melalui transformasi habitus akademik. Otoritas tidak lagi bertumpu pada kepemilikan informasi, tetapi pada kapasitas mengarahkan proses produksi makna serta pembentukan orientasi intelektual peserta didik (Litvinaitė, 2022).

Relasi kuasa yang mengiringi rekonstruksi otoritas memperlihatkan kemunculan aktor baru yang ikut memengaruhi produksi dan distribusi pengetahuan. Platform digital, perusahaan teknologi, pengembang sistem AI, dan komunitas daring menjadi bagian jaringan yang berkontribusi terhadap pembentukan legitimasi pengetahuan. Perspektif kuasa-pengetahuan menjelaskan bahwa otoritas tidak hanya lahir melalui penguasaan ilmu, tetapi juga melalui kemampuan mengendalikan akses, klasifikasi, dan sirkulasi informasi (Parada-Ulloa et al., 2026). Sistem algoritmik memiliki kapasitas menentukan visibilitas pengetahuan tertentu sehingga berpotensi memengaruhi preferensi intelektual pengguna (Bogert, Schechter, & Watson, 2021). Kondisi ini menciptakan arena kekuasaan yang lebih kompleks dibanding struktur otoritas tradisional. Guru tidak lagi menghadapi peserta didik sebagai satu-satunya sumber rujukan ilmiah, tetapi berinteraksi dengan ekosistem digital yang memproduksi alternatif otoritas secara terus-menerus. Rekonstruksi otoritas berlangsung melalui kemampuan aktor pendidikan mengelola hubungan antara sumber legitimasi tradisional dan mekanisme distribusi pengetahuan berbasis teknologi.

Dinamika adaptasi memperlihatkan variasi respons yang tidak selalu menghasilkan keberhasilan. Sebagian institusi mampu mengintegrasikan teknologi melalui regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan etika akademik. Sebagian lain menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, kesenjangan generasi, serta resistensi kelompok yang memandang teknologi sebagai ancaman terhadap identitas pendidikan Islam. Variasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan rekonstruksi otoritas dipengaruhi kombinasi faktor struktural, kultural, dan institusional. Perspektif perubahan sosial menegaskan bahwa transformasi tidak berlangsung seragam karena setiap institusi memiliki konfigurasi sumber daya, sejarah organisasi, dan tingkat keterbukaan yang berbeda. Kegagalan adaptasi berpotensi menghasilkan fragmentasi legitimasi ketika otoritas tradisional kehilangan daya pengaruh sementara sumber legitimasi baru belum memperoleh penerimaan luas (Patnaik et al., 2022). Situasi semacam ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi otoritas selalu mengandung kemungkinan konflik, ketidakpastian, dan resistensi yang berkelanjutan.

Perdebatan mengenai legitimasi juga mengungkap perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan otoritas keilmuan. Legitimasi tradisional yang bertumpu pada sanad, kedalaman penguasaan disiplin ilmu, dan pengakuan komunitas tetap memiliki posisi penting. Perkembangan teknologi menghadirkan legitimasi profesional yang terkait kemampuan mengelola informasi digital serta legitimasi algoritmik yang terbentuk melalui visibilitas, popularitas, dan keterhubungan dalam jaringan digital. Ketiga bentuk legitimasi tidak selalu saling menguatkan, bahkan sering berada dalam hubungan kompetitif. Individu yang memiliki pengaruh besar pada ruang digital belum tentu memperoleh pengakuan

akademik yang kuat, sedangkan pemegang otoritas tradisional belum tentu mampu mempertahankan pengaruh pada ekosistem teknologi. Proses negosiasi berlangsung melalui upaya menghubungkan berbagai sumber legitimasi agar dapat diterima komunitas pendidikan Islam. Hasilnya berupa konfigurasi otoritas yang lebih plural dan bergantung pada kemampuan aktor mengintegrasikan kompetensi intelektual, moral, dan digital.

Rekonstruksi sosial otoritas keilmuan memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak bergerak menuju penghapusan tradisi ataupun dominasi teknologi secara penuh. Interaksi antara tekanan inovasi, kepentingan institusional, modal simbolik guru, norma komunitas, dan perkembangan teknologi menghasilkan bentuk sintesis yang terus dinegosiasikan. Sanad, etika keilmuan, dan relasi pedagogis tetap berfungsi sebagai sumber legitimasi penting, sementara kompetensi digital, literasi algoritmik, dan kemampuan mengelola pengetahuan menjadi syarat baru bagi keberlanjutan otoritas. Konfigurasi ini menunjukkan pergeseran otoritas dari model monopolistik menuju model jaringan yang lebih terdistribusi. Legitimasi tidak ditentukan semata oleh posisi struktural, tetapi oleh kapasitas untuk membangun kepercayaan, mengelola pengetahuan, dan mempertahankan integritas moral pada lingkungan yang semakin terdigitalisasi. Rekonstruksi yang terjadi bersifat dinamis, terbuka terhadap perubahan, serta terus dipengaruhi oleh pertarungan makna dan kepentingan yang berkembang pada ruang pendidikan Islam kontemporer.

Dinamika Produksi dan Legitimasi Pengetahuan dalam Ekosistem AI

Produksi dan distribusi pengetahuan mengalami transformasi struktural seiring integrasi kecerdasan buatan ke dalam infrastruktur digital yang menghubungkan proses pencarian, seleksi, penyajian, dan reproduksi informasi. Perubahan ini menggeser locus pembentukan otoritas epistemik dari komunitas keilmuan menuju sistem sosioteknis yang menggabungkan data, algoritma, platform, dan perilaku pengguna. Perspektif sosiologi pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah beredar secara netral karena selalu dipengaruhi oleh mekanisme institusional yang menentukan visibilitas, relevansi, dan legitimasi informasi (Argote et al., 2022). Algoritma berfungsi sebagai perangkat tata kelola epistemik yang mengatur pengetahuan melalui proses pemeringkatan, personalisasi, dan rekomendasi berbasis data (Machen & Nost, 2021). Struktur ini membentuk rezim visibilitas baru yang menentukan pengetahuan mana yang muncul, tersebar, dan memperoleh perhatian publik.

Legitimasi pengetahuan berkembang melalui mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan tradisi akademik dan keilmuan Islam yang menempatkan sanad, kompetensi, integritas ilmiah, serta pengakuan komunitas sebagai sumber otoritas. Ekosistem AI memperlihatkan kemunculan legitimasi berbasis performativitas algoritmik, yakni penerimaan sosial yang lahir dari kemampuan sistem menghasilkan jawaban cepat, konsisten, responsif, dan mudah dipahami

(Scott & Orlikowski, 2025). Proses ini berkaitan erat dengan pembentukan *epistemic trust*, yaitu kepercayaan pengguna terhadap sumber pengetahuan yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan kognitif secara efisien (Li, Campbell, Midgley, & Luyten, 2023). Kepercayaan tidak terbentuk semata karena akurasi informasi, tetapi juga karena antarmuka komunikatif AI yang menampilkan karakteristik yang menyerupai pakar manusia. Situasi tersebut menggeser dasar legitimasi dari pengakuan komunitas epistemik menuju pengalaman pengguna terhadap performa teknologi. Otoritas pengetahuan kemudian semakin terkait dengan efektivitas sistem menghasilkan jawaban yang memuaskan ekspektasi pengguna, sehingga legitimasi sosial sering kali mendahului proses verifikasi epistemik yang lazim berlaku dalam tradisi keilmuan.

Perubahan mekanisme legitimasi berhubungan langsung dengan berkembangnya bentuk baru otoritas yang beroperasi melalui tata kelola algoritmik. Otoritas algoritmik bekerja melalui pengaturan pilihan, preferensi, dan orientasi pengguna yang tertanam pada arsitektur platform. Perspektif *algorithmic governance* menjelaskan bahwa algoritma bertindak sebagai aktor yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sosial tanpa menggantikan peran manusia sepenuhnya (Gritsenko & Wood, 2022). Produksi otoritas lahir melalui interaksi kompleks antara perusahaan teknologi, perancang sistem, data pelatihan, institusi pendidikan, komunitas pengguna, serta regulasi yang mengelilinginya. Hubungan tersebut menghasilkan bentuk agensi terdistribusi yang sulit dilacak secara individual. Hegemoni epistemik muncul ketika mekanisme algoritmik diterima sebagai prosedur normal untuk memperoleh pengetahuan sehingga asumsi, kategori, dan prioritas yang tertanam dalam sistem secara perlahan membentuk kerangka berpikir pengguna tanpa memerlukan legitimasi normatif yang eksplisit.

Objektivitas pengetahuan menjadi arena kontestasi penting karena AI sering dipersepsikan sebagai instrumen netral yang bekerja berdasarkan kalkulasi matematis. Persepsi semacam ini mengabaikan fakta bahwa setiap sistem dibangun melalui proses seleksi data, desain model, dan keputusan teknis yang mengandung nilai, kepentingan, serta preferensi tertentu. Pengetahuan yang dihasilkan AI merupakan produk konstruksi sosioteknis yang merefleksikan kondisi historis dan politik sumber datanya (Kudina & van de Poel, 2024). Bias tidak hanya muncul sebagai kesalahan teknis, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi otoritas ketika informasi yang diproduksi memperoleh visibilitas tinggi, diterima pengguna, lalu direproduksi secara luas melalui jaringan digital. Rangkaian proses tersebut mengubah bias menjadi pengetahuan yang tampak objektif dan kredibel. Fenomena ini menunjukkan bahwa objektivitas algoritmik bukan kondisi yang bebas nilai, melainkan hasil negosiasi antara struktur data, desain teknologi, dan penerimaan sosial yang membentuk persepsi kolektif mengenai kebenaran.

Demokratisasi pengetahuan yang sering dikaitkan dengan kecerdasan buatan memerlukan pembacaan yang lebih kritis karena perluasan akses informasi tidak identik dengan distribusi kekuasaan epistemik yang setara. Akses yang semakin terbuka memang memungkinkan individu memperoleh berbagai sumber informasi tanpa hambatan geografis maupun institusional. Meskipun demikian, proses seleksi dan penyajian pengetahuan tetap berada di bawah kendali infrastruktur digital yang dimiliki serta dioperasikan oleh aktor tertentu. Kekuasaan epistemik berpindah menuju organisasi yang mengendalikan data, model komputasional, dan arsitektur platform. Kondisi ini menciptakan paradoks ketika pengetahuan tampak tersedia bagi semua orang, sementara parameter yang menentukan relevansi dan keterlihatannya berada di luar jangkauan pengguna. Demokratisasi akhirnya berlangsung bersamaan dengan konsentrasi kekuasaan epistemik.

Persoalan validitas muncul ketika mekanisme pembentukan pengetahuan berbasis probabilitas statistik berinteraksi dengan tuntutan epistemologis yang mensyaratkan justifikasi, koherensi, reliabilitas, dan keterujian. Sistem AI menghasilkan respons melalui prediksi pola linguistik yang memiliki kemampuan tinggi dalam merepresentasikan informasi, tetapi tidak selalu mampu menjamin kesesuaian antara pernyataan dan realitas empiris (Heilbron et al., 2022). Tantangan utama mencakup persoalan reliabilitas epistemik yang berkaitan dengan kemampuan sistem menghasilkan pengetahuan yang dapat diverifikasi secara konsisten. Epistemologi digital menegaskan pentingnya mengembangkan mekanisme evaluasi yang mengintegrasikan kapasitas komputasional dengan standar validasi ilmiah (Potluka et al., 2025). Lingkungan pendidikan Islam menghadapi kebutuhan mendesak untuk menghubungkan hasil generatif AI dengan tradisi verifikasi keilmuan yang menekankan ketelitian sumber, konsistensi metodologis, dan akuntabilitas intelektual.

Otentisitas pengetahuan juga mengalami redefinisi akibat kemampuan AI untuk menghasilkan sintesis baru melalui rekombinasi data berskala besar. Pandangan yang menganggap seluruh produk AI tidak memiliki unsur kreativitas cenderung menyederhanakan kompleksitas proses generatif yang berlangsung dalam sistem modern. Persoalan utama terletak pada transparansi jejak epistemik yang memungkinkan pengguna menelusuri asal-usul, konteks, dan kredibilitas sumber pengetahuan. Ketika hubungan antara hasil generatif dan sumber pembentuknya tidak dapat diidentifikasi secara memadai, proses evaluasi keilmuan menghadapi hambatan serius (Dabran-Zivan, Klein-Avraham, & Baram-Tsabari, 2026). Tradisi pendidikan Islam yang menempatkan sanad sebagai mekanisme penjamin kredibilitas menghadapi tantangan baru karena otoritas tidak lagi melekat pada rantai transmisi yang dapat diverifikasi secara jelas. Rekonstruksi otentisitas memerlukan pengembangan sistem yang mampu menghubungkan pengetahuan generatif dengan sumber, metode, dan konteks pembentukannya sehingga akuntabilitas epistemik tetap dapat dipertahankan.

Transformasi produksi, distribusi, validasi, dan legitimasi pengetahuan menunjukkan bahwa kecerdasan buatan membentuk ulang mekanisme pembentukan otoritas keilmuan. Pengetahuan diproduksi melalui jaringan sosioteknis yang mempertemukan data, algoritma, platform, institusi, dan pengguna dalam hubungan yang saling memengaruhi. Mediasi algoritmik mengatur visibilitas informasi sekaligus membentuk kepercayaan epistemik yang menjadi dasar penerimaan sosial terhadap pengetahuan. Kepercayaan tersebut berkembang menjadi legitimasi ketika hasil komputasi dipandang mampu memenuhi kebutuhan kognitif secara efektif dan konsisten. Legitimasi selanjutnya berkontribusi terhadap lahirnya bentuk baru otoritas yang bertumpu pada performativitas algoritmik, bukan semata pengakuan komunitas epistemik. Pendidikan Islam menghadapi kebutuhan strategis untuk merekonstruksi otoritas keilmuan melalui integrasi antara tradisi verifikasi ilmiah, akuntabilitas normatif, dan kapasitas komputasional agar perkembangan teknologi tetap berada dalam kerangka rasionalitas, tanggung jawab, dan integritas epistemik.

Penutup

Transformasi ekosistem pengetahuan berbasis kecerdasan buatan menunjukkan bahwa otoritas keilmuan pendidikan Islam mengalami rekonstruksi menuju model hibrida yang mengintegrasikan legitimasi tradisional, kapasitas epistemik guru, dan dukungan teknologi digital. Temuan utama memperlihatkan pergeseran peran guru dari pemegang otoritas informasi menuju otoritas validasi, interpretasi, dan pembinaan nilai, sementara legitimasi pengetahuan dibentuk melalui interaksi antara kredibilitas sumber, transparansi algoritmik, kompetensi literasi digital, penerimaan komunitas akademik, serta prinsip adab dan tanggung jawab moral yang menjadi karakter pendidikan Islam. Kondisi tersebut menegaskan munculnya otoritas epistemik baru yang bersifat kolaboratif dan negosiatif tanpa meniadakan fungsi guru sebagai penjaga integritas keilmuan. Implikasi teoretis memperkaya sosiologi pendidikan Islam melalui perluasan konsep otoritas, transmisi ilmu, dan konstruksi sosial pengetahuan yang kini dipengaruhi oleh aktor nonmanusia berupa sistem algoritmik. Implikasi praktis mencakup pengembangan kurikulum literasi AI, penguatan mekanisme verifikasi informasi, pelatihan etika digital, serta penyusunan tata kelola pemanfaatan AI bagi lembaga pendidikan Islam. Keterbatasan mencakup sifat konseptual-interpretatif, ketergantungan pada telaah literatur, serta belum adanya verifikasi lapangan lintas institusi. Agenda riset berikutnya perlu menguji model otoritas keilmuan hibrida melalui studi empiris komparatif, longitudinal, dan interdisipliner guna menjelaskan variasi persepsi legitimasi pengetahuan berbasis AI pada beragam konteks pendidikan Islam.

Daftar Pustaka

Akiba, D., & Fraboni, M. C. (2023). AI-Supported Academic Advising: Exploring ChatGPT's Current State and Future Potential toward Student Empowerment. *Education Sciences*, 13(9), 885. <https://doi.org/10.3390/educsci13090885>

- Alavi, M., Leidner, D. E., & Mousavi, R. (2024). Knowledge Management Perspective of Generative Artificial Intelligence. *Journal of the Association for Information Systems*, 25(1), 1–12. <https://doi.org/10.17705/1jais.00859>
- Amir, S. M., Harahap, A. P., Rahmi, T., & Nazmi, K. (2024). Transformative Islamic Education Based on Hadith Values: Leadership Character Building Strategy for Santri. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 159–172. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v18i2.497>
- Ardani, & Mwila, P. M. (2025). Islamic Education through the Digital Storytelling Method in Islamic Date Learning. *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 64–72. <https://doi.org/10.47453/permata.v6i2.3275>
- Argote, L., Guo, J., Park, S.-S., & Hahl, O. (2022). The Mechanisms and Components of Knowledge Transfer: The Virtual Special Issue on Knowledge Transfer Within Organizations. *Organization Science*, 33(3), 1232–1249. <https://doi.org/10.1287/orsc.2022.1590>
- Bagasharov, A., Zhantaeva, M., Khalizhan, K., Kurmanbayev, Y., & Khaydarov, N. (2026). Epistemology of Interpretation in the Era of Artificial Intelligence: Authority, Validity, and the Limits of AI's Role in Quranic Interpretation. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.64691/21y5h822>
- Barzen, A. (2025). Constructing unverifiable reality: a qualitative study of the prison planet conspiracy hypothesis on YouTube. *Frontiers in Sociology*, 10, 1583960. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1583960>
- Berg, K. van den, Bedner, B., Zheng, M., Grote, P., & Shema, A. (2026). The Contestation of Interpretational Authority between 'Ulamā' and Artificial Intelligence: A Critical Study of AI Epistemology in Quranic Studies. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 20–38. <https://doi.org/10.64691/dh6rwb84>
- Bogert, E., Schechter, A., & Watson, R. T. (2021). Humans rely more on algorithms than social influence as a task becomes more difficult. *Scientific Reports*, 11(1), 8028. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-87480-9>
- Dabran-Zivan, S., Klein-Avraham, I., & Baram-Tsabari, A. (2026). When the source is a bot: How people adapt their evaluation strategies to assess AI-generated content. *PLOS One*, 21(3), e0345300. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0345300>
- Dogruel, L., Facciorusso, D., & Stark, B. (2022). 'I'm still the master of the machine.' Internet users' awareness of algorithmic decision-making and their perception of its effect on their autonomy. *Information, Communication & Society*, 25(9), 1311–1332. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1863999>
- Fogaça, D., Grijalvo, M., & Neto, M. S. (2022). An institutional perspective in the industry 4.0 scenario: A systematic literature review. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 15(2), 309. <https://doi.org/10.3926/jiem.3724>
- Forum, W. E. (2024). *Shaping the Future of Learning: The Role of AI in Education 4.0*. Diambil dari <https://www.weforum.org/publications/shaping-the-future-of->

learning-the-role-of-ai-in-education-4-0/

- Gritsenko, D., & Wood, M. (2022). Algorithmic governance: A modes of governance approach. *Regulation & Governance*, 16(1), 45–62. <https://doi.org/10.1111/rego.12367>
- Hall, J. A. (2020). The Social Construction of Technology. In *Relating Through Technology* (hal. 31–47). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108629935.003>
- Handini, O. (2025). The Impact of Technological Pedagogical and Content Knowledge on Teacher Professional Development in Technology Integration Practices. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 27(1), 287–295. <https://doi.org/10.21009/jtp.v27i1.54675>
- Harris, A., & Jones, M. (2019). Teacher leadership and educational change. *School Leadership & Management*, 39(2), 123–126. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1574964>
- Hastuti, H., Maulana, H. F., Lawelai, H., & Suherman, A. (2025). Algorithmic influence and media legitimacy: a systematic review of social media's impact on news production. *Frontiers in Communication*, 10, 1667471. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1667471>
- Haugaard, M. (2022). Foucault and Power: A Critique and Retheorization. *Critical Review*, 34(3–4), 341–371. <https://doi.org/10.1080/08913811.2022.2133803>
- Heilbron, M., Armeni, K., Schoffelen, J.-M., Hagoort, P., & de Lange, F. P. (2022). A hierarchy of linguistic predictions during natural language comprehension. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(32), 2201968119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2201968119>
- Höttecke, D., & Allchin, D. (2020). Reconceptualizing nature-of-science education in the age of social media. *Science Education*, 104(4), 641–666. <https://doi.org/10.1002/sce.21575>
- Huan, X., Jagalur, J., & Marzouk, Y. (2024). Optimal experimental design: Formulations and computations. *Acta Numerica*, 33, 715–840. <https://doi.org/10.1017/S0962492924000023>
- Korneeva, E., Salge, T. O., Teubner, T., & Antons, D. (2023). Tracing the legitimacy of Artificial Intelligence: A longitudinal analysis of media discourse. *Technological Forecasting and Social Change*, 192, 122467. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122467>
- Kudina, O., & van de Poel, I. (2024). A sociotechnical system perspective on AI. *Minds and Machines*, 34(3), 21. <https://doi.org/10.1007/s11023-024-09680-2>
- Kusuma, Z., Handayani, S. A., Aslam, M., & Salleh, N. F. binti. (2025). The Intellectual Traces of Women in the Golden Age of Islam: From Science to Cosmopolitan Culture. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(4), 306–320. <https://doi.org/10.64691/dx657048>
- Li, E., Campbell, C., Midgley, N., & Luyten, P. (2023). Epistemic trust: a comprehensive review of empirical insights and implications for

- developmental psychopathology. *Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome*, 26(3), 704. <https://doi.org/10.4081/ripppo.2023.704>
- Litvinaitė, J. (2022). Between resistance and collaboration: A teacher's professional activity in the Third Space. *Journal of Education Culture and Society*, 13(1), 157–171. <https://doi.org/10.15503/jecs2022.1.157.171>
- Machen, R., & Nost, E. (2021). Thinking algorithmically: The making of hegemonic knowledge in climate governance. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 46(3), 555–569. <https://doi.org/10.1111/tran.12441>
- OECD. (2021). *OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. Diambil dari https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-education-outlook-2021_589b283f-en.html
- Papakostas, C. (2025). Artificial Intelligence in Religious Education: Ethical, Pedagogical, and Theological Perspectives. *Religions*, 16(5), 563. <https://doi.org/10.3390/rel16050563>
- Parada-Ulloa, M., Marambio, J. B., Carmona, H., & Gutiérrez, Ó. V. (2026). From knowledge as domination to knowledge as governmentality: a theoretical rearticulation of power in late-modern knowledge regimes. *Frontiers in Sociology*, 11, 1799909. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1799909>
- Patnaik, S., Munjal, S., Varma, A., & Sinha, S. (2022). Extending the resource-based view through the lens of the institution-based view: A longitudinal case study of an Indian higher educational institution. *Journal of Business Research*, 147, 124–141. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.091>
- Potluka, O., Harten, S., Kocks, A., & Dvorak, J. (2025). Digitalization in evaluations and evaluations of digitalization: The changing landscape of evaluations. *Evaluation*, 31(3), 289–302. <https://doi.org/10.1177/13563890251357650>
- Rahmani, M. (2025). Membangun Kurikulum Sains Islami: Relevansi Al-Quran dan Hadis dalam Pendidikan STEM di Era Digital. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 176–196. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.14>
- Saepurohman, A., Badrudin, Erihadiana, M., Sri Lestari, A., & Alai, A. (2025). Strategic Management of Digital Literacy Initiatives in Islamic Boarding Schools of Tasikmalaya. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 238–250. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i2.1711>
- Safrizal, M., Baker, S., Peterson, J., Amaefule, Z., & Hamad, K. S. (2026). The Transformation of Quranic Studies in the Era of Artificial Intelligence: An Epistemological Shift from Classical Scientific Tradition to the Digital Ecosystem. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 39–58. <https://doi.org/10.64691/d45aj033>
- Samuelsson, R. (2025). From technological distribution to educational innovation: How context, curriculum, and local practice frame educational technology use in early childhood education. *Education and Information Technologies*, 30(12), 17023–17048. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13462-3>

- Schot, J., & Kanger, L. (2018). Deep transitions: Emergence, acceleration, stabilization and directionality. *Research Policy*, 47(6), 1045–1059. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.03.009>
- Scott, S. V., & Orlikowski, W. J. (2025). Exploring AI-in-the-making: Sociomaterial genealogies of AI performativity. *Information and Organization*, 35(1), 100558. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2025.100558>
- Seo, K., Tang, J., Roll, I., Fels, S., & Yoon, D. (2021). The impact of artificial intelligence on learner–instructor interaction in online learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1), 54. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00292-9>
- Shahzad, M. F., Xu, S., & Zahid, H. (2025). Exploring the impact of generative AI-based technologies on learning performance through self-efficacy, fairness & ethics, creativity, and trust in higher education. *Education and Information Technologies*, 30(3), 3691–3716. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12949-9>
- Siregar, U. N. (2025). Penggunaan AI dan Big Data dalam Pembelajaran Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis di Madrasah. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 160–175. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.13>
- Sulhayani, S. (2025). Pemetaan Data Hadis Melalui Teknologi Blockchain: Upaya Menjaga Keotentikan dan Keamanan Informasi Hadis. *Hamidah: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 30–42. <https://doi.org/10.64691/fw9hcf02>
- Syukur, F., Maghfurin, A., Marhamah, U., & Phaosan Jehwae. (2024). Integration of Artificial Intelligence in Islamic Higher Education: Comparative Responses between Indonesia and Thailand. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(3), 531–553. <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i3.13>
- Tang, X., Du, X., Wang, Q., & Wu, J. (2024). Intelligent recognition of high-quality academic papers: based on knowledge-based metasemantic networks. *Scientometrics*, 129(11), 6779–6812. <https://doi.org/10.1007/s11192-024-05157-2>
- Umar, Z. A., Hidayat, M., Qomarullah, A. B., & Mutmainnah, R. (2025). Scientific Cosmopolitanism in 9th-Century Baghdad: Muslim, Jewish, and Christian Knowledge Exchange in Sociological Perspective. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(4), 242–255. <https://doi.org/10.64691/aqz5ej83>
- Umar, Z. A., & Yunus, M. (2025). Optimalisasi Teknologi OCR dalam Digitalisasi Manuskrip Hadis: Studi Akurasi dan Tantangan Linguistik Arab Klasik. *Hamidah: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.64691/6vn20070>
- UNESCO. (2025). *AI and Education: Guidance for Policy-Makers*. Paris. Diambil dari <https://www.unesco.org/en/articles/ai-and-education-guidance-policy-makers>